

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Salatiga

Halaman 4

DPRD Bukan Lembaga “Penjegal” APBD

SALATIGA - Ancaman pencoretan usulan anggaran eksekutif oleh legislatif tak terbukti. Bahkan dalam rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Persetujuan Bersama Terhadap RAPBD Kota Salatiga Perubahan Tahun 2017, Selasa (12/9), DPRD meloloskan hampir semua usulan eksekutif.

Bahkan, dalam rapat paripurna Penyampaian Pengantar 16 Raperda atas Inisiatif Walikota pada Propemperda Tahun 2016 ‘diamini’ legislatif. Dengan fakta itu, anggota Komisi C Supriyadi Fakhri saat ditemui wartawan usai rapat paripurna menegaskan, DPRD untuk Anggaran Perubahan 2017 meloloskan hampir semua usulan eksekutif. Supriyadi menyebut, DPRD bukan lembaga ‘penjegal’ persetujuan anggaran APBD Perubahan 2017.

“DPRD bukan lembaga penjegal APBD. Terbukti, kami meloloskan semua usulan eksekutif. Kami mau lihat seperti apa kinerja mereka setelah permintaan anggaran disetujui semua. Kami akan awasi dan evaluasi,” kata Supriyadi, kemarin.

Dia juga berharap jangan sampai ada alasan tidak cukup waktu pelaksanaan pada saat proyek berjalan. Eksekutif diharapkan benar-benar bekerja profesional agar semua anggaran yang diusulkan dilaksanakan.

Ia tak menampik ada beberapa anggota dewan yang sempat ‘berteriak’ akan mencoret usulan terkait proyek penunjukan langsung (PL). Namun teriakan itu adalah suara pribadi atau kelompok tertentu saja.

Ia pun menyebut, beberapa anggaran besar yang disetujui antara lain dana pembangunan fisik dan pembelian alat kesehatan (alkes) senilai Rp 37 miliar, pembangunan pasar dan beberapa proyek besar lainnya. “Persetujuan yang dilakukan DPRD sebagai lembaga mitra kerja eksekutif menginginkan agar pembangunan di Kota Salatiga berjalan lancar dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, pernyataan berbeda disampaikan Suniprat dari Fraksi PDIP. Dia mengatakan bahwa tak semua diloloskan, seperti pengadaan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah untuk 23 kelurahan terpaksa tak diloloskan.

“Ada alasan mengapa tak diloloskan karena akan memunculkan kecemburuan sosial antar warga. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) untuk operasional sampah di tingkat kelurahan belum ada,” imbuhnya.

Walikota Yuliyanto berharap kerja sama yang harmonis antara DPRD dan pemda dapat terus terpelihara. Bahkan ditingkatkan di masa-masa mendatang sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas yang diamanatkan untuk membangun Salatiga.

Dalam kesempatan itu, walikota memerintahkan seluruh OPD untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD Perubahan TA 2017 agar pelaksanaan APBD Perubahan tahun ini dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. ■ *ma/SR*